

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

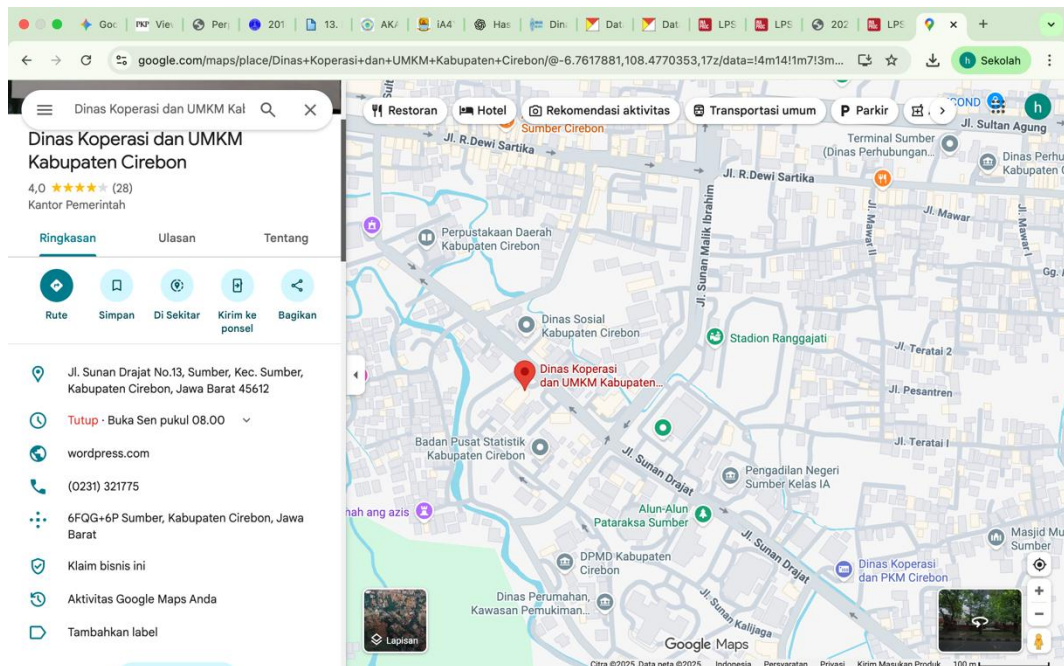
1.1 Objek Penelitian

3.1.1 Profil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Cirebon adalah salah satu lembaga daerah yang mempunyai tanggung jawab utama dan fungsi dalam merencanakan serta melaksanakan kebijakan daerah terkait koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Organisasi ini didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008, dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 yang selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2023 mengenai Posisi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Pengelolaan Dinas Koperasi serta UKM.

Secara historis, peran pengelolaan koperasi dan UMKM mungkin awalnya berada di bawah instansi lain (seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Bagian Ekonomi Setda) sebelum akhirnya menjadi dinas yang berdiri sendiri. Pemisahan atau penciptaan dinas yang independen ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya konsentrasi dan keahlian dalam menangani persoalan-persoalan rumit yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM. Di Kabupaten Cirebon, pembentukan dinas ini kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal yang sangat bergantung pada sektor ini, serta untuk mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting sebagai elemen pelaksana otonomi daerah yang khusus bertugas dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas ini bertindak sebagai asisten kepala daerah (baik Bupati/Walikota di tingkat daerah maupun Gubernur di tingkat provinsi) dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi hak otonom daerah. Jabatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas menunjukkan adanya tanggung jawab dalam manajemen dan aspek teknis yang jelas untuk merumuskan serta menerapkan kebijakan dan program yang berkaitan dengan sektor UMKM. Secara struktural, Kepala Dinas ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, meskipun untuk kegiatan sehari-hari dan koordinasi, tanggung jawab tersebut umumnya dijalankan melalui Sekretaris Daerah. Posisi ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kolaborasi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Selain sebagai fungsi administratif, peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat strategis karena berkaitan langsung dengan sektor ekonomi rakyat yang menjadi pilar utama perekonomian nasional, dengan sumbangan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dinas ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam upaya pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi yang inklusif di daerahnya, menjadikan pelaksanaan program dan kebijakan yang mereka lakukan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah.



Sumber: Google MAPS

Gambar 3.1
Alamat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon

3.1.1.1 Visi dan Misi

A. Visi

Mewujudkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak perekonomian daerah, berdaya saing, berkualitas, dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

2. Meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
3. Meningkatkan akses pembiayaan, teknologi, pemasaran, dan jaringan usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. Mendorong kemandirian dan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

3.1.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

A. Fungsi Pokok

Perumusan Kebijakan dan Perencanaan: Merumuskan bahan perencanaan dan kebijakan spesifik di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

B. Tugas Pokok

Melaksanakan administrasi internal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dan Melakukan pengevaluasian dan pelaporan atas seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.

1) Aspek Koperasi (Pengaturan dan Pengawasan):

1. Fasilitasi perizinan simpan pinjam koperasi.
2. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan terhadap koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) perkoperasian.
4. Melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi.

2) Aspek Usaha Mikro dan Kecil (Pengembangan):

1. Melakukan fungsi pemberdayaan dan pengembangan bagi Usaha Mikro.
2. Melaksanakan administrasi internal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan atas seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.

3.1.1.4 Keadaan Pegawai

Berjalannya organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Cirebon sangat ditentukan oleh komunitas kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Cirebon memiliki 13 (tiga belas) pegawai, terbagi atas berbagai golongan atau jenjang pendidikan.

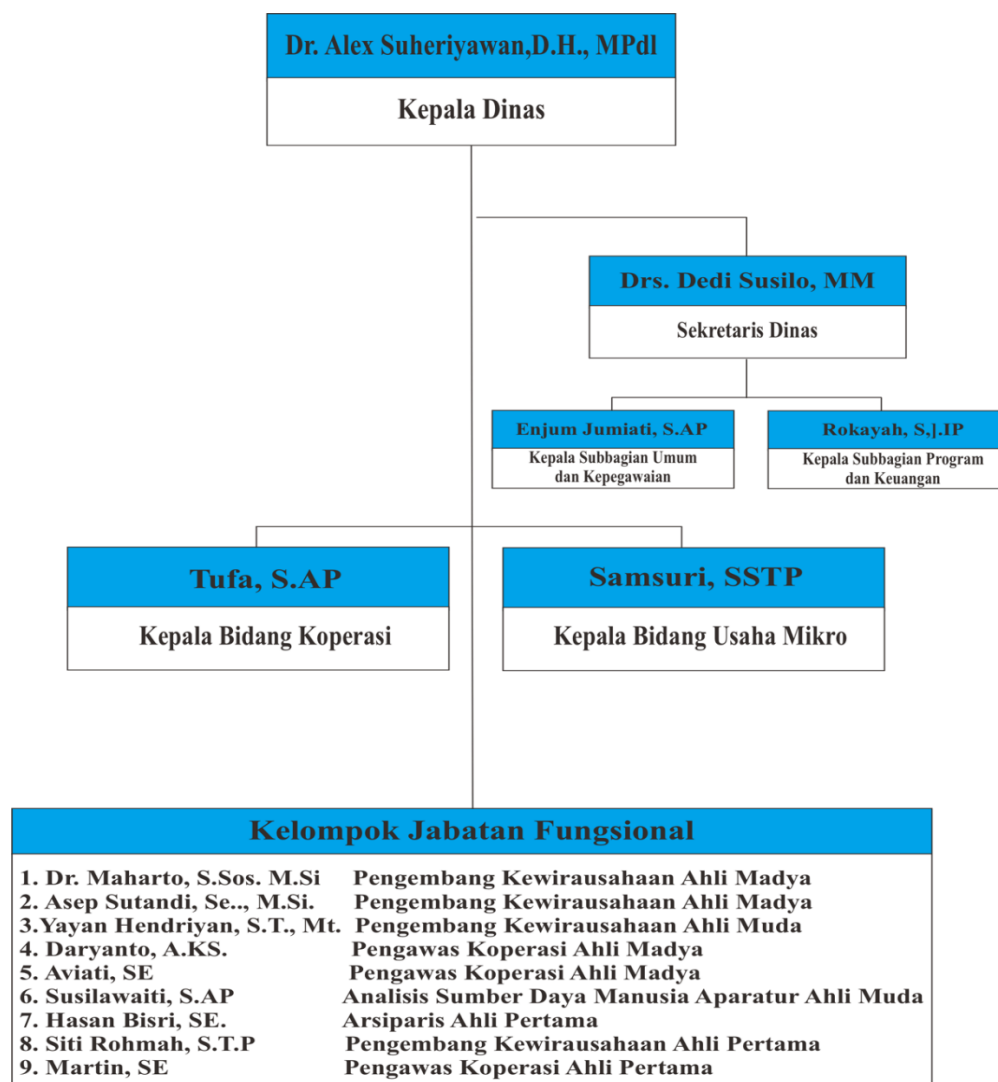
Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
	Menurut Tingkat Pendidikan		
1.	Doktoral (S3)	1	Orang
2.	Pascasarjana (S2)	2	Orang
3.	Strata (S1)	8	Orang
4.	SLTA	2	Orang
Jumlah		13	Orang
2.	Menurut Golongan		

	Eselon IV	4	Orang
	Eselon III	7	Orang
	Eselon II	2	Orang
Jumlah		13	Orang

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon

3.1.1.5 Struktur Organisasi



Sumber: Arsip Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Gambar 3.1
Struktur Organisasi

3.1.2 Profil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon

Pembentukan dan penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon berlandaskan pada peraturan daerah yang menetapkan kedudukan, struktur organisasi, serta tugas dan fungsinya. Regulasi pelaksanaan yang digunakan saat ini merujuk pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Secara struktural, dinas ini berada di bawah kewenangan Bupati dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Keselamatan No.1, Cirebon.

Bidang layanan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon mencakup beberapa tugas utama, mulai dari operasional pemadaman dan penyelamatan yang meliputi penanganan kebakaran secara sigap dan efisien, evakuasi korban bencana maupun kecelakaan, hingga respons terhadap keadaan darurat termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3). Di sisi pencegahan, dinas bertugas menyusun serta melaksanakan program edukasi keselamatan kebakaran, melakukan inspeksi dan audit pada bangunan, serta merumuskan strategi pengendalian kebakaran di wilayah Kabupaten Cirebon. Sementara itu, pada aspek pengembangan dan administrasi, dinas mengelola dukungan administratif, keuangan, dan logistik, melakukan penelitian serta pengembangan terkait inovasi pemadaman dan penyelamatan, dan memastikan pengelolaan data serta informasi berjalan dengan baik.

3.1.3 Kasturi Catering

Kasturi Catering merupakan salah satu unit usaha mikro dan kecil (UMK) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cirebon. Usaha ini didirikan pada tahun 2013 oleh Ibu Yeyet, yang merintis bisnis catering dari hobi memasak hingga berkembang menjadi usaha professional. Kasturi catering beralamat di Jl. P. Cakrabuana, blok Jl. Pemijen, RT.13/RW.04, Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Dan memiliki karyawan sejumlah kurang lebih 10 orang dan mendirikan bisnisnya hingga membangun tenan di dalam swalayan. Kasturi catering sendiri berfokus pada kuliner lokal yang menjadi unggulannya adalah nasi liwet. Reputasinya sudah terkenal luas dikarenakan Ibu Yeyet merupakan pemenang bintang dapur royco pada tahun 2010. Dalam satu tahun terakhir Kasturi Catering telah mengikuti kebijakan PBJ pemerintah melalui e-katalog serta aktif sebagai UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon.

3.1.4 Djava Production

Djava production merupakan UMKM yang berfokus pada konveksi yang berdiri sejak tahun 2007, yang didirikan oleh Eko Fatturohman. Usaha ini awalnya dibangun Bersama rekan, namun seiring berjalannya waktu, Bapak Eko mengembangkan dan mengelola usaha tersebut secara mandiri. Sejak awal usaha ini berfokus pada produksi berbagai jenis seragam, terutama seragam dinas, seragam sekolah, dan berbagai kebutuhan *custom* sehingga menjadi salah satu penyedia jasa konveksi yang cukup dikenal di Kabupaten Cirebon. Djava production beralamat di Jl. Otto Iskandardinta (Otista), sebelah barat Ramayana

Plered dan saat ini telah memiliki lebih dari 15 Karyawan yang menangani proses produksi. Dalam operasionalnya Djava Production telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, sekolah dan Lembaga masyarakat untuk penyediaan seragam. Djava Production juga telah mengikuti kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) selama satu tahun terakhir.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian merujuk pada teknik-teknik yang digunakan untuk merencanakan dan menjalankan sebuah studi yang bertujuan untuk menemukan solusi atau jawaban atas suatu masalah atau pertanyaan yang perlu dipecahkan.

Moleong (2017:7) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan detail mengenai suatu masalah, situasi, atau fenomena sosial yang kompleks.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mendukung UMKM lokal di Kabupaten Cirebon. Metode deskriptif diutamakan untuk mengamati realitas sosial seperti apa adanya, dalam konteks aslinya, tanpa adanya campur tangan atau manipulasi. Dimana hasil penelitian berupa kata-kata tertulis bukan angka. Metode ini digunakan untuk memahami makna, pandangan, dan interpretasi orang dalam situasi atau fenomena yang dipelajari. Metode ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau studi kasus.

3.2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dalam konteks metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendalami dan menjelaskan dengan rinci proses, dinamika, serta makna yang terdapat dalam praktik pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang mendukung UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Pendekatan deskriptif dalam desain ini menekankan pada kemampuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, objektif, dan tepat tentang fenomena atau kondisi yang diteliti, yaitu implementasi PBJP-UMKM, tanpa perlu melakukan interpretasi atau penarikan kesimpulan lebih lanjut pada tahap penggambaran data.

3.2 Informan dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Informan

Informan merupakan orang-orang yang terlibat dalam penelitian sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti. Data yang diperoleh dari informan menggunakan cara wawancara yang mendalam. Informan diperoleh dari kunjungan penulis ke objek penelitian dimana dilihat dari orang-orang yang memiliki wawasan mengenai judul yang diperoleh.

Informan dibagi menjadi dua yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau wawasan yang sangat relevan dan berharga terkait dengan topik penelitian atau studi yang sedang dilakukan. Informan pendukung adalah membantu dalam

memperkuat argumen atau pengambilan keputusan, atau memberikan wawasan atau perspektif tambahan yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya.

1. Informan Kunci

Yayan Hendriyan, S.T., MT. selaku Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Cirebon

2. Informan Pendukung

- 1) Linda Lelawati (P1) selaku Konsultan Business Development Service (BDS)
- 2) Anan Wahid Hidayanto, ST (P2) selaku BPP Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon
- 3) Yeyet Rumiati(P3) selaku pelaku UMKM catering kasturi yang sudah terlibat dalam Kebijakan PBJ
- 4) Eko Fatturohman, ST (P4) selaku Pelaku UMKM konveksi lokal yang sudah terlibat dalam kebijakan PBJ.
- 5) Samina (P5) selaku pelaku UMKM pengrajin batik trusmi yang belum terlibat dalam kebijakan PBJ.
- 6) Dimas Suprianto, S.T (P6) selaku Pengelola Layanan Pengadaan (UKPBJ) Kab. Cirebon

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mengambil informasi atau fakta yang terkait dengan suatu topik atau masalah yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang

akurat, dapat dipercaya, dan mewakili populasi yang relevan dengan penelitian atau masalah yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *literature review* adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai sumber bacaan atau literatur yang relevan dengan topik penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan menjadi dua teknik yaitu:

- a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala aktivitas yang dilakukan di objek penelitian yang dilakukan secara langsung. Observasi bertempat pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Cirebon.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para informan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian. Penulis melakukan wawancara langsung kepada Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Dinas KUMKM, Staff BDS, Staff Dinas Pemadam Kebakaran, Staff UKPBK, UMKM yang terlibat dan belum terlibat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara mengumpulkan data-data UMKM yang pernah terlibat dalam implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa.

Untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari pengamatan langsung, studi ini akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari dokumen dan informasi yang telah tersedia. Ini meliputi peraturan seperti Perpres PBJP dan Perda/Perbup yang berkaitan dengan UMKM/Pengadaan, laporan prestasi dinas yang bersangkutan, data statistik mengenai UMKM di Kabupaten Cirebon, serta dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD). Penggunaan data sekunder ini sangat penting untuk memberikan konteks, mendukung hasil, dan meningkatkan keandalan penelitian.

3.4 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi tindakan atau operasi yang dapat diukur atau diamati secara konkret. Dalam kata lain, operasionalisasi adalah proses mengubah konsep teoritis menjadi variabel-variabel atau indikator yang dapat diukur secara empiris.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter	Sumber Data
Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Budiwarno (2008)	1. Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Kejelasan dan pengertian mengenai tujuan dari kebijakan 2. Konsistensi isi dari kebijakan	1. Dokumen peraturan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021) 2. Wawancara

		3. Indikator kinerja dan pencapaian	dengan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon
	2. Sumber daya	1. Ketersediaan dana dan fasilitas 2. Kemampuan dan keahlian sumber daya manusia 3. Bantuan infrastruktur teknologi digital	1. Dokumen rencana biaya 2. Pembicaraan dengan tim pelaksana, pengamatan di tempat kerja.
	3. Komunikasi antar organisasi pelaksana	1. Sistem pengaturan antar-Organisasi pelaksana daerah 2. Efektivitas penyampaian informasi kepada UMKM 3. Proses dan kejelasan data	1. Wawancara antara berbagai organisasi pelaksana 2. Pedoman prosedur operasional 3. Wawancara usaha kecil dan menengah.
	4. Karakteristik organisasi pelaksana	1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi ditetapkan dengan jelas 2. Kewenangan melaksanakan tugas 3. Kemudahan dalam proses pengambilan keputusan	1. Dokumen mengenai susunan organisasi 2. Wawancara dengan pemimpin bagian.
	5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik	1. Profil UMKM lokal 2. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemimpin	1. Data statistik UMKM 2. Wawancara pelaku UMKM, pejabat daerah

		daerah 3. Kesiapan sosial masyarakat	
	6. Disposisi atau sikap pelaksana	1. Pemahaman mengenai inti dari kebijakan 2. Dedikasi dan dorongan pribadi 3. Ketaatan dan kemampuan untuk merespons	1. Wawancara mendalam pejabat pelaksana, observasi sikap birokrasi

3.5 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan tiga atau lebih sumber data yang berbeda untuk memeriksa dan memvalidasi temuan atau informasi yang didapatkan dari masing-masing sumber data tersebut. Tujuan dari teknik ini adalah untuk meningkatkan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

Untuk mendapatkan kepercayaan, dapat dilakukan beberapa langkah berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Mengevaluasi perbedaan antara apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Mengamati apakah apa yang diungkapkan oleh orang-orang tentang situasi penelitian selaras dengan apa yang mereka katakan sepanjang waktu
4. Membandingkan sudut pandang dan pengalaman seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kalangan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengkaji, memahami, dan memberikan interpretasi terhadap data yang terkumpul dari suatu penelitian. Tujuan utama dari teknik analisis data adalah untuk menemukan pola, kecenderungan, hubungan, serta makna dari data yang terkumpul. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif.

Menurut Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dengan tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, tahap reduksi data merupakan upaya penting dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, menyortir, dan menyusun data yang telah dikumpulkan agar dapat diolah dan dianalisis secara lebih efektif dan efisien. Tahap ini biasanya dilakukan setelah tahap pengumpulan data selesai, dimana peneliti akan memeriksa kembali dan mengatur data yang telah terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti dalam tahapan reduksi data dengan tahapan memilah

data-data yang dibutuhkan dari sebuah rekaman saat wawancara dan menghapus data yang tidak penting saat wawancara.

2. Display data, display data mengacu pada cara untuk menampilkan data secara grafis atau numerik agar mudah dipahami oleh pengguna. Display data dapat menggunakan metode seperti tabel, diagram, grafik, atau visualisasi interaktif. Tujuan utama dari display data adalah untuk membantu pengguna dalam menganalisis dan memahami data dengan lebih efisien dan efektif. Dengan menggunakan display data yang tepat, pengguna dapat melihat pola, tren, dan hubungan dalam data dengan lebih jelas dan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data tersebut. Dalam memilih metode display data yang tepat, harus dipertimbangkan jenis data yang akan ditampilkan, tujuan analisis data, serta preferensi dan kebutuhan pengguna.
3. Verifikasi adalah proses memeriksa dan memastikan keabsahan data atau informasi yang disajikan. Penarikan kesimpulan, di sisi lain, adalah proses membuat kesimpulan yang valid berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah diverifikasi. Penarikan kesimpulan ini biasanya dilakukan setelah data telah diverifikasi dan dianalisis secara cermat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya dan masuk akal. Tahapan verifikasi untuk menarik kesimpulan memuat unsur-unsur:
 - a. Vestehen, proses pemahaman data yang dikumpulkan berdasarkan kategori dan karakteristik masing-masing.

- b. Interpretasi, yaitu proses pemahaman yang seakurat mungkin terhadap arti dan maksud data yang diabaikan.
- c. Koherensi, yaitu proses menemukan keselarasan antara bahan-bahan yang berbeda yang diperoleh dari data yang dikumpulkan.
- d. Hermeneutika, yaitu proses analisis penafsiran terhadap data yang terkumpul, sehingga esensi data dapat dipahami sesuai dengan konteks waktu sekarang.
- e. Induktif, yaitu proses menyimpulkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk membentuk konstruksi melalui pemahaman intuitif untuk merumuskan kesimpulan logis.

3.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dilakukan peneliti adalah selama 4 (empat) bulan terhitung dari akhir Juni sedangkan sampai akhir September.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

[illegible]

